

# Membangun Peradaban dari “Urusan Belakang”

Urusan belakang di sini tidak jauh bicara tentang buang-membuang yang kotor dari aktivitas kita sehari-hari atau sering kita sebut limbah. Kegiatan sehari-hari menghasilkan limbah berupa padatan yang disebut dengan sampah dan berupa cairan yang biasa disebut air limbah.



oleh **Subekti**  
Direktur Utama PD PAL Jaya  
dan Ketua Forkalim

**K**enapa menjadi ‘urusan belakang’? Kebiasaan kita yang melekat sehari-hari, apabila kita sedang bertamu dan minta izin akan buang hajat ke WC atau toilet, biasanya selalu menyebut ‘mohon izin ke belakang’. Hal ini mungkin akibat sebagian besar letak/posisi WC atau toilet terletak di belakang dari bagian rumah. Dengan kata lain, sudah kebiasaan masyarakat kita, meletakkan dan “menyembunyikan” yang kotor di belakang rumah, termasuk letak tangki septik.

Tetapi, *kok* dikaitkan dengan peradaban? Urusan belakang ini biasa kita sebut sanitasi (limbah padat/sampah, limbah cair dan *drainage*), bukan hanya urusan membangun infrastruktur saja, *lho!* Ini juga membutuhkan perubahan perilaku, tata nilai, *mindset*, dan tata kelola yang baik seluruh *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, dll.), yang membutuhkan sosialisasi, promosi, dan edukasi jangka panjang. Intinya, membangun sanitasi adalah membangun seluruh aspek kehidupan manusia baik dari sisi infrastruktur fisik dan non fisik. Jadi, tidak ada yang instan untuk urusan sanitasi. Itulah peradaban.

Bagaimana konteks dengan pembangunan infrastruktur ‘urusan belakang’ di Indonesia? Mungkin karena menjadi ‘urusan belakang’, pencapaian pembangunan sanitasi juga masih perlu perjuangan. Kenapa? Sebagai ilustrasi, posisi tahun 2018 baru satu provinsi yang mendeklarasikan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yaitu Yogyakarta, atau sekitar 42 juta jiwa di Indonesia yang belum punya jamban dan tangki septik. Nilai ini besar sekali. Lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia dan Australia, atau tujuh kali lipat lebih dari penduduk Singapura.

Dari sisi regulasi juga masih jauh ketinggalan. Air limbah belum punya aturan setingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Secara teknis, baru diatur peraturan setingkat peraturan menteri. Dari sisi politis, mungkin jarang yang kotor-kotor ini dijadikan janji politik kandidat presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan kepala desa.

Sebagai ilustrasi lain, Pemerintah saat ini sudah membangun kurang lebih 283 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi, baru sekitar 50 persen daerah yang punya IPLT. Dari 283 daerah tersebut, yang berfungsi dengan baik jumlahnya bisa dihitung jari, di bawah 20 persen. Kecil, ya? Berarti, masih banyak kota dan kabupaten yang hasil penyedotan jasa truk sedot WC-nya dibuang entah ke mana. Ke kali? Ke saluran air? Ke sawah?

Ya, jangan-jangan air yang kita digunakan untuk kegiatan sehari-hari dari air sungai yang tercemar. Jangan-jangan sumur yang dipakai mandi, sikat gigi, dan sebagainya sudah tercemar (karena jarak tangki septik dan sumur terlalu dekat atau kurang 10 meter). Jangan-jangan kita berwudhu pun dengan air yang tidak memenuhi air suci dan mensucikan.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa sekian banyak IPLT *kok* tidak berfungsi dengan baik? Penyebabnya, pertama, input lumpur tinja (sedot WC) yang tidak kontinyu. Karena, sebelum diolah di IPLT, terdapat rangkaian kegiatan pengosongan, penyedotan, dan transportasi. Di samping itu, terdapat sumber daya manusia yang

kapasitasnya belum memadai untuk pengoperasian IPLT. Sebab lainnya ialah karena masalah kelembagaan dan keuangan, serta regulasi yang mengatur.

Cukup kompleks bukan untuk mengoperasikan sebuah IPLT? Untuk menyelesaikan ini semua, tentu bukan hanya pemerintah saja yang bergerak, melainkan seluruh masyarakat harus berubah.

Kadang kita semua terlalu abai pada pengaruh sanitasi yang buruk. Penyakit diare, panu, kudis, hepatitis A, bahkan *stunting* itu salah satu penyebabnya adalah buruknya sanitasi. *Stunting* adalah pertumbuhan tidak sempurna pada anak-anak. Dampak *stunting* juga menyebabkan kecerdasan anak menurun. Data menunjukkan, ada sembilan juta balita yang mengalami *stunting*. Ada sembilan juta anak yang kecerdasannya menurun. Padahal, Indonesia menghadapi persaingan yang semakin keras ke depan.

Teman-teman penggiat sanitasi, jangan lelah untuk mewartakan kebaikan terkait sanitasi. Jadi, tidak salah saya selalu memanggil teman-teman penggiat sanitasi ini sebagai ‘pejuang’, dan yang akan kita perjuangkan adalah peradaban. Ayo, saling mengingatkan dan selalu mengajak untuk menjadi lebih baik dari hal yang sederhana: buang sampah di tempatnya, *septic tank* yang kedap (tidak rembes), WC kita sedot secara berkala, serta berperilaku hidup sehat. Semoga anak cucu kita nanti mengenang kita telah berjuang untuk kebaikan. **■**